

KELEMBAGAAN KELOMPOK TANI HUTAN DI KECAMATAN BARUSJAHE KABUPATEN KARO SUMATERA UTARA

Institutional Forest Farmers in Barusjahe District Karo Regency North Sumatera

Laura Julita br Ginting ¹⁾, Ridwanti Batubara ²⁾, Herianto ²⁾

¹⁾Mahasiswa Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara (Penulis Korespondensi e-mail: laurhaa13emass@gmail.com) ²⁾Staff Pengajar Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara

Abstract

Institutional has an important role in supporting the people's forest management. The institution started from a group which has the same characteristics and purpose. The purpose of this study is to know the institutional system of forest farmer groups in the forest management, such as land management activities, structural and cultural aspects, institutional objectives, membership and leadership, and institutional capacity in the Rumanis Village, Pertumbuken Village, and Sikab Village. The results of this research showed that the land management activities include: land cleanup and nurseries, weeding, replanting, thinning, and fertilization. Leader in select based professionalism owned by the leadership. Institutional system of forest farmers groups in district of Barusjahe has the same purpose to reduce deforestation and made members better. Institutional capacity is still as organizer of counseling and help to solved the problems of farmers.

Keywords: Institutional, Farmers Group, Forest

PENDAHULUAN

Hutan adalah kekayaan alam yang dikuasai oleh negara sesuai pasal 33 UUD 1945 : "bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Dalam praktiknya negara hanya menjalankan sebagian pasal 33, yakni penguasaan negara atas hutan, namun mengabaikan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Dalam pengelolaannya hutan dapat dilakukan oleh warga masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok atau berdasarkan suatu badan hukum. Masyarakat memanfaatkan hutan sebagai alternatif sumber pendapatan, melalui manfaat hasil hutan berupa kayu dan non kayu. Sistem 'tebang butuh' merupakan ciri masyarakat tani hutan rakyat dalam pemanfaatan hasil kayu. Pola pemanfaatan dan interaksi masyarakat desa dengan hutan cukup beragam dan berbeda-beda satu sama lainnya, tergantung kondisi kesuburan tanah, kultur masyarakat secara umum, dan kebijakan lokal kabupaten yang terkait dengan pembangunan hutan kemasyarakatan setempat.

Pembangunan kehutanan perlu didukung dengan kegiatan penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan, peraturan perundang-undangan, penyediaan informasi serta penelitian dan pengembangan. Peranan dan mutu kelembagaan kehutanan baik pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya terus ditingkatkan. Disini pemanfaatan fungsi hutan terjadi melalui evolusi yang kemudian membentuk aturan tertentu yang dinamakan tradisi atau disebut juga hukum adat.

Masyarakat di sekitar hutan pada umumnya merupakan kelompok masyarakat yang relatif tertinggal secara sosial dan ekonomi dibandingkan dengan kelompok masyarakat lain. Di Indonesia terdapat 48,8 juta orang yang tinggal pada lahan hutan Negara, sekitar 10,2 juta diantaranya dianggap miskin. Selain itu ada 20 juta orang yang tinggal di desa-desa dekat hutan dan 6 juta orang diantaranya memperoleh sebagian penghidupannya dari hutan. Keberadaan masyarakat sekitar kawasan hutan merupakan komponen

yang secara langsung berinteraksi dengan hutan yang berada disekitarnya.

Kelembagaan adat sosial budaya dapat dipahami dengan cara pendekatan antropologi sistem pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Kecamatan Barusjahe merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Karo, provinsi Sumatera Utara. Kecamatan ini memiliki 18 desa yang saling berdekatan. Kecamatan Barusjahe merupakan salah satu daerah pertanian yang luas yang khususnya untuk tanaman semusim. Mayoritas mata pencaharian masyarakat di Kecamatan Barusjahe adalah bertani. Peran serta aktif dan dinamika dari seluruh masyarakat dalam melaksanakan pembangunan terus ditingkatkan dan ditumbuhkembangkan. Salah satu upaya pokok pembangunan kehutanan yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat di dalam dan sekitar hutan untuk berpartisipasi dalam pembangunan kehutanan melalui partisipasi masyarakat dalam bentuk kelembagaan masyarakat dalam bentuk kelompok tani.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem kelembagaan kelompok tani hutan masyarakat desa dalam pengelolaan hutan, seperti aktivitas pengelolaan lahan, aspek struktural dan aspek kultural, tujuan kelembagaan, keanggotaan dan kepemimpinan, dan kapasitas kelembagaan di desa-desa Kecamatan Barusjahe. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ataupun gambaran tentang peran masyarakat desa dalam pengelolaan hutan dan sistem kelembagaannya sehingga dapat berguna sebagai masukan, baik bagi instansi pemerintah dan masyarakat dalam memberikan solusi atau kontribusi dalam pemecahan masalah yang terkait dengan masalah-masalah sistem kelembagaan hutan. Hasil dari penelitian ini diharapkan juga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait guna pengembangan kelembagaan sosial masyarakat dalam pengelolaan hutan maupun untuk kepentingan akademik atau penelitian serupa lainnya.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu

Penelitian ini mengambil tempat di Kecamatan Barusjahe, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Waktu pengumpulan data dan penelitian dilakukan pada bulan Juli 2014 sampai September 2014.

Alat dan Objek Penelitian

Penelitian ini memerlukan beberapa alat bantu seperti alat tulis, kamera, dan kuisioner. Sedangkan objek penelitian yaitu ketua dan perwakilan kelompok tani hutan yang terdapat di Desa Rumanis, Desa Pertumbuken, dan Desa Sikab Kecamatan Barusjahe. Jumlah responden adalah 30 orang.

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari hasil wawancara kepada responden dan data sekunder berasal dari instansi atau lembaga terkait.

Metode Pengambilan Contoh dan Pengumpulan Data

Pengambilan contoh pada penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap.

1. Pengambilan contoh pada tingkat desa yang terdapat di Kecamatan Barusjahe, pemilihan desa dipilih secara sengaja dengan berdasarkan pada ada tidaknya struktur kelembagaan di desa tersebut. Pemilihan desa sebanyak 3 desa, yaitu Desa Rumanis, Desa Pertumbuken, dan Desa Sikab.
2. Pengambilan contoh kelompok tani yang didasarkan ada tidaknya struktur kelembagaan pada kelompok tani dan keaktifan kelompok tani. Masing-masing desa memiliki 1 (satu) kelompok tani. Kelompok Tani "Tani Jaya" di Desa Rumanis, Kelompok Tani "Juma Kendit" di Desa Pertumbuken, dan Kelompok Tani "Reh-Ulina" di Desa Sikab.
3. Pemilihan responden di dalam kelompok tani. Pemilihan responden dilakukan secara acak sebanyak 10 orang setiap kelompok tani.

Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan beberapa teknik berdasarkan jenis data yang dibutuhkan.

1. Teknik wawancara
2. Teknik observasi
3. Pencatatan data sekunder

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lahirnya Kelembagaan

Pada lokasi penelitian, kelompok tani Tani Jaya, Juma Kendit, dan Reh-Ulina memiliki tujuan lahirnya kelembagaan yang tidak jauh berbeda. Terbentuknya kelembagaan kelompok tani didasarkan pada ketergantungan masyarakat sekitar hutan terhadap pemanfaatan hutan. Pemanfaatan hutan yang sering dilakukan masyarakat adalah memanfaatkan hasil hutan kayu maupun non kayu. Bahkan ada juga masyarakat yang nekat menebang pohon-pohon yang berada di hutan yang dekat dengan kawasan pemukiman masyarakat.

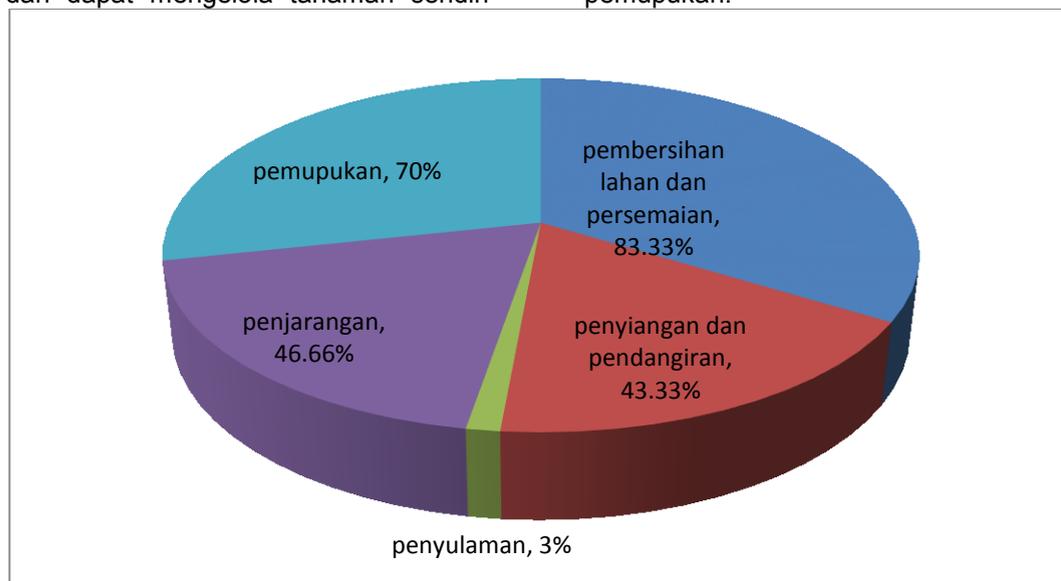
Masyarakat menyadari bahwa pemanfaatan hutan secara terus-menerus dapat merusak hutan. Oleh sebab itu masyarakat membentuk kelompok tani hutan sebagai wadah meminta bantuan pemerintah, baik dalam pengadaan benih atau bibit agar dapat dikelola oleh anggota kelompok dan dapat mengelola tanaman sendiri

agar terpenuhinya perekonomian masyarakat itu sendiri. Kesamaan kepentingan menyebabkan adanya upaya kerjasama untuk mencapai tujuan dan memenuhi kepentingan bersama.

Lahirnya kelembagaan juga terlihat dalam program Perum Perhutani yang pada awalnya dianggap gagal dalam menjalankan fungsinya. Hal ini terbukti dengan terjadinya perusakan hutan besar-besaran secara massal, yang berarti bahwa selama ini pemerintah melalui Perhutani sangat kecil perannya dalam mengajak masyarakat sekitar dan dalam hutan untuk mengelola hutan. Maka Perum Perhutani menggulirkan program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) melalui surat keputusan Dewan Pengawas Perum Perhutani No. 136/KPTS/DIR/2001 tentang PHBM.

Aktivitas Pengelolaan Lahan

Kegiatan yang dilakukan oleh kelompok tani di Kecamatan Barusjahe yaitu Kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) di lahan masyarakat. Aktivitas pengelolaan lahan yang dilakukan oleh petani cukup beragam yaitu pembersihan lahan dan persemaian, penyiangan dan pendangiran, penjarangan, penyulaman, dan pemupukan.



Gambar 1. Diagram aktivitas pengelolaan lahan

Aktivitas petani yang paling sering dilakukan adalah pembersihan lahan dan persemaian. Total responden yang

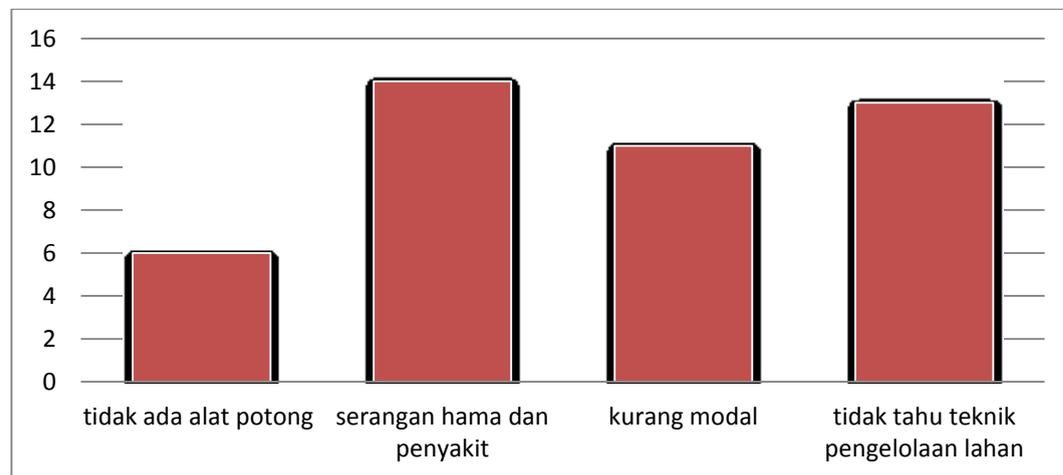
melakukan kegiatan pembersihan lahan dan persemaian sebesar 83,33%. Pada kegiatan ini terlebih dahulu dilakukan

pembersihan lahan lahan dari rumput-rumput liar ataupun semak belukar yang ada pada lahan dan langsung dilanjut dengan penyemaian benih-benih yang telah melalui seleksi untuk menghasilkan bibit yang unggul.

Kegiatan pengelolaan kedua yang paling banyak dilakukan oleh petani adalah pemupukan. Total responden yang melakukan kegiatan pemupukan sebesar 70%. Kegiatan pemupukan dimaksudkan untuk menambah unsur hara pada tanaman yang diperlukan sehingga diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan tanaman. Pupuk diberikan secara melingkar kurang lebih 10-15 cm dari batang tanaman dan ditutup kembali dengan tanah. Dosis pemupukan disesuaikan dengan pupuk yang tersedia. Kegiatan

pengelolaan lahan yang paling sedikit dilakukan oleh para petani adalah penyulaman. Petani yang melakukan kegiatan penyulaman sebesar 33,33%. Petani yang tidak melakukan pembersihan lahan dikarenakan sibuk dengan pekerjaan lain, padahal seharusnya dilakukan untuk mengurangi daya saing penyerapan unsur hara dalam tanah.

Dalam pengelolaan lahan milik terutama lahan hutan tentulah tidak terlepas dari kendala dan permasalahan yang menyangkut kegiatan pengelolaan tersebut. Beberapa di antaranya terkait dengan kondisi lahan, pemeliharaan tanaman, ketersediaan air dan pupuk, serangan hama dan penyakit, kurangnya dana, sampai sulitnya akses jalan menuju lokasi lahan milik.



Gambar 2. Diagram kendala pengelolaan lahan

Kelompok tani di Kecamatan Barusjahe mengalami kendala utama dalam pengelolaan lahan yaitu masalah serangan hama dan penyakit, seperti binatang (belalang, kumbang, ulat, wereng, tikus) dan organisme kecil (virus, bakteri, jamur). Hal ini terlihat dari 14 dari 30 responden di ketiga kelompok tani hutan tersebut. Sementara kendala lainnya yang juga kerap kali mengiringi kegiatan pengelolaan hutan para petani yaitu pengetahuan tentang teknik pengelolaan dan juga kekurangan modal dalam pengadaan pupuk untuk pemeliharaan tanaman.

Jenis tanaman yang diusahakan petani hutan dalam KTH hampir sama. KTH Tani Jaya mengusahakan tanaman suren dan nangka; KTH Juma Kendit

mengusahakan tanaman mahoni dan suren; dan KTH Reh-Ulina mengusahakan tanaman mahoni, suren, dan nangka.

Terdapat beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi petani dalam pengelolaan lahan. Dari sejumlah kendala dan permasalahan tersebut, tentunya ada upaya ataupun solusi yang dilakukan para petani untuk menyelesaikannya. Dalam hal penanganan masalah serangan hama dan penyakit, sebagian petani menggunakan obat semprot untuk membasminya. Sedangkan petani lain menggunakan cara manual untuk memusnahkannya. Dalam permasalahan lainnya yakni kurangnya pengetahuan para petani dalam upaya

pemeliharaan tanaman, dititik beratkan atau ditanyakan kepada ketua kelompok tani. Dan ketua kelompok tani dengan kesepakatan bersama meminta diadakannya penyuluhan oleh pemerintah (dalam hal ini Dinas Kehutanan Kab. Karo) untuk menambah wawasan masyarakat terkhusus kepada anggota kelompok tani. Peran pemerintah juga dapat dilihat dari pengawasan kegiatan yang dilakukan dan evaluasi kemajuan pelaksanaan kegiatan di lapangan maupun kendala yang ada dalam pelaksanaan kegiatan.

Sedikit berbeda dengan pelaksanaan program PHBM di Desa Ciulu Kecamatan banjarsari Kabupaten Ciamis pada penelitian Sunaedi (2013) yang meliputi: perencanaan (perencanaan bibit tanaman, perencanaan perkiraan perolehan hasil dan perencanaan pemasaran); penanaman dengan sistem silvikultur dan sistem tumpang sari yang bermanfaat dan memiliki nilai ekonomis untuk masyarakat; pemeliharaan dengan cara pemupukan secara berkala untuk meningkatkan kesuburan tanah, penyemprotan berkala untuk meminimalisir terkena hama dan pembersihan rumput liar yang ada pada lahan yang ditanami; perlindungan dalam hal pengawasan terhadap penjarahan dan penebangan liar; pemanenan hasil hutan, dan pembagian hasil berdasarkan kesepakatan Perum Perhutani dengan KTH Desa Ciulu.

Pada penelitian ini tidak terdapat kegiatan perlindungan, pemanenan, dan pembagian hasil dikarenakan KTH yang terbentuk melalui program KBR tersebut baru terbentuk dan kegiatan tersebut belum bisa dilakukan.

Aspek Struktural Kelembagaan

Dalam sebuah kelembagaan yang beranggotakan sejumlah orang dengan visi dan misi yang sama, tentunya tidak terlepas dari struktur kelembagaan. Struktur kelembagaan memiliki fungsi internal maupun eksternal untuk mencapai tujuan bersama yang menyediakan kejelasan bagian-bagian pekerjaan dalam aktifitas kelembagaan. Fungsi internal kelembagaan menjadi pedoman bagi anggotanya dalam bertindak. Sedangkan fungsi eksternal kelembagaan menjelaskan tentang

bagaimana dan siapa yang akan berhubungan dengan pihak dari luar.

Kelembagaan kelompok tani yang dibahas yaitu : Tani Jaya di Desa Rumanis, Juma Kendit di Desa Pertumbuken, dan Reh-Ulina di Desa Sikab. Luas cakupan kelompok tani tersebut seperti tertera pada Tabel 2.

Tabel 2. Luas cakupan wilayah kelompok tani

| No. | Kelompok Tani | Luas Lahan (Ha) | |
|-----|---------------|--|--|
| | | Persemaian | Penanaman |
| 1. | Tani Jaya | Blok/Dusun Tambunen Luas 0,25 ha | <ul style="list-style-type: none"> • Blok Dusun Pertanggalen Luas 15 ha • Blok/Dusun Sabah Dokan Luas 30 ha • Blok/Dusun Tegur Luas 10 ha • Blok/Dusun Proyek Luas 20 ha Total = 75 ha |
| 2. | Juma Kendit | Blok/Dusun Pertumbuken Luas 0,25 ha | Blok/Dusun Pertumbuken Luas 90ha |
| 3. | Reh-Ulina | Blok/Dusun Kabung Luas 0,25 ha | <ul style="list-style-type: none"> • Blok/Dusun Kabung Luas 45,25 ha • Blok/Dusun Siberteng Luas 45 ha Total = 90 ha |

Kelompok tani Tani Jaya memiliki cakupan wilayah 75,25 ha dengan jumlah anggota 22 orang, dengan rata-rata kepemilikan lahan anggotanya seluas 3,42 ha/orang. Kelompok tani Juma Kendit memiliki cakupan wilayah 90,25 ha dengan jumlah anggota 16 orang, dengan rata-rata kepemilikan lahan anggotanya seluas 5,64 ha/orang. Kelompok tani Reh-Ulina memiliki cakupan wilayah 90,25 ha dengan jumlah anggota 20 orang, dengan rata-rata kepemilikan lahan anggotanya seluas 4,51 ha/orang. Kelompok tani memperkerjakan orang-orang selain anggota (sering disebut 'aron') untuk mengelola lahan yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan.

Pola sebaran kekuasaan yang terjadi di ketiga kelembagaan kelompok tani menyatakan bahwa pola sebaran kekuasaan bersifat distributif. Sebaran kekuasaan distributif artinya pembagian tugas dan wewenang tidak hanya dilimpahkan ke satu orang saja akan

tetapi didistribusikan ke beberapa orang pada dasarnya mampu dan berkapasitas dalam menangani tugas tersebut. Hal ini dapat dilihat dari beragamnya struktur organisasi yang dibentuk oleh kelompok tani seperti tertera pada Tabel 3.

Tabel 3. Struktur kelembagaan kelompok tani

| No. | Kelompok Tani | Struktur Kelembagaan | Jumlah Anggota |
|-----|---------------|---|----------------|
| 1. | Tani Jaya | Ketua Sekretaris Bendahara Anggota | 22 orang |
| 2. | Juma Kendit | Ketua Sekretaris Bendahara Anggota | 16 orang |
| 3. | Reh-Ulina | Ketua Sekretaris Bendahara Tim Perencana Tim Pelaksana Tim Pengawas Anggota | 20 orang |

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa ketiga kelompok tani memiliki struktur organisasi secara inti beserta anggota kelompok. Kelompok tani Reh-Ulina lebih maju dibandingkan kelompok tani Tani Jaya dan Juma Kendit dilihat dari struktur kelembagaan yang ada bukan hanya ketua, sekretaris, dan bendahara.

Kelompok tani Reh-Ulina yang mencantumkan bidang lain di luar struktur inti yaitu:

1. Tim perencana, sebagai tim yang membuat dan mengatur berbagai rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. Tim pelaksana, sebagai tim yang mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan.
3. Tim pengawas, sebagai tim yang mengawasi pelaksanaan kegiatan untuk hasil yang terbaik.

Struktur kelembagaan yang dibentuk oleh masing-masing kelompok tani pada dasarnya menyesuaikan dengan kebutuhan yang dirasakan oleh kelompok tani tersebut dan berkaitan dengan efektifitas pelaksanaan aktivitas yang dilakukan oleh kelompok tani tersebut. Struktur kelembagaan tidak memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan petani, namun mempermudah pekerjaan petani,

sehingga tujuan bersama dapat cepat tercapai.

Hampir sama dengan hasil penelitian Widiyanti (2009) di Wilayah Cianjur Selatan bahwa pembagian tugas dalam kelompok tani secara langsung dilimpahkan kepada anggota kelompok. Dimana KTH membentuk bidang diluar struktur inti, antara lain: seksi penanaman, seksi operasional, seksi keamanan, seksi pemasaran, seksi lokasi, seksi pemeliharaan kayu, seksi peralatan, seksi usaha, dan seksi pemeliharaan.

Tujuan Kelembagaan

Kelompok tani memiliki tujuan lebih mengutamakan kelompok. Ketiga kelompok tani ini memiliki tujuan yang sama, yaitu mengurangi kerusakan hutan dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Dimana anggota dapat berkontribusi yang lebih dalam kelompok dikarenakan kesamaan tujuan-tujuan tersebut.

Perum Perhutani juga dalam Yudianto (2006) secara terus menerus dan konsisten menuju pengelolaan hutan lestari dengan melakukan persiapan sertifikasi KPH Jawa Tengah dan Jawa Barat agar hutan Jawa dan Madura berfungsi secara optimal dalam konservasi lingkungan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi.

Keanggotaan

Dalam hal pola perekrutan anggota, kelompok tani Tani Jaya, Juma Kendit, maupun Reh-Ulina termasuk bersifat :

- 1) tidak bebas (anggota hanya berasal dari desa bersangkutan),
- 2) terbatas (jumlah anggota maksimal 30 orang), dan
- 3) tertutup (hanya petani hutan).

Hal ini ditunjukkan dari adanya beberapa syarat untuk menjadi anggota kelompok tani. Syarat yang pertama yaitu calon anggota harus memiliki lahan (pribadi atau sewa) dan diperuntukkan untuk tanaman kayu. Syarat yang kedua yaitu calon anggota harus berasal dari desa kelompok tani itu sendiri. Jumlah anggota pada KTH Tani Jaya sebanyak 22 orang, KTH Juma Kendit sebanyak 16 orang, dan KTH Reh-Ulina sebanyak 20 orang.

Dalam hal kesetiaan dan pengabdian para anggotanya ketiga kelompok tani menyatakan kesetiaan anggota cukup tinggi. Rasa kesetiaan ini terlihat dari partisipasi anggota saat diadakan pertemuan dan rapat-rapat yang berkaitan dengan kinerja kelompok. Anggota yang hadir apabila diadakan pertemuan kelompok lebih dari 50%, baik pada saat penyuluhan maupun rapat anggota. Anggota yang tidak dapat menghadiri pertemuan, biasanya diwakili oleh salah satu anggota keluarga atau izin untuk tidak menghadiri pertemuan kelompok. Pertemuan yang rutin dapat dijadikan sarana untuk mengikat komitmen para anggotanya. Kelompok tani menyatakan pertemuan kelompok bersifat rutin dan tetap. Mereka mengagendakan pertemuan 2 (dua) bulan sekali. Apabila kelompok memerlukan lebih banyak pertemuan, maka dapat diadakan pertemuan tambahan. Pertemuan disini membahas permasalahan-permasalahan yang dialami petani, penyuluhan ataupun diskusi mengenai program-program yang akan dilaksanakan. Dilihat dari partisipasi anggota dalam pengambilan keputusan, seluruh responden menyatakan bahwa jumlah anggota yang berpartisipasi cukup tinggi dan melibatkan banyak anggota. Artinya seluruh anggota memiliki kesempatan yang sama untuk memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan kelangsungan kinerja kelompoknya.

Berbeda dengan KTH Desa Ciulu dalam Sunaedi (2013), pihak Perhutani tidak membatasi jumlah anggota kelompok. Jumlah petani hutan yang tergabung dalam KTH di Desa Ciulu sebanyak 144 orang. Untuk mempercepat tali komunikasi dan memantapkan kelembagaan diadakan pertemuan yang berkelanjutan antara pengurus dengan anggota KTH, petugas Perhutani dan Kepala Desa Ciulu.

Kepemimpinan

Kepemimpinan dalam kelembagaan adalah suatu yang penting karena merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan kelembagaan tersebut dalam mencapai tujuannya. Kepemimpinan yang baik dapat memperkecil sistem yang kurang

baik yang artinya kunci keberhasilan kelembagaan.

Dalam proses kepemimpinan dipilih dan ditetapkan, anggota kelompok tani yang diwawancarai menyatakan pemimpin kelompok dipilih berdasarkan kemampuan atau keprofesionalan yang dimiliki. Pemimpin tidak dipilih secara asal melainkan harus di uji terlebih dahulu, seperti diadakannya tanya jawab. Dengan demikian, seorang pemimpin kelompok tani pada dasarnya telah dibekali dengan pengalaman dan kemampuan yang lebih dibanding anggotanya yang lain dalam hal kepemimpinan.

Gaya kepemimpinan yang diterapkan kelompok tani adalah demokratis. Gaya kepemimpinan ini sangat memperhatikan penyampaian pendapat setiap anggotanya. Proses pengambilan keputusan dilakukan melalui mekanisme musyawarah. Dengan demikian setiap anggota memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapat mereka.

Pergantian pemimpin yang terjadi dalam kelompok tani tidak terjadi secara regular karena menurut mereka ketua kelompok tani baru akan diganti jika ketua tersebut sudah menyatakan dirinya tidak sanggup lagi untuk menjadi ketua, atau kesepakatan sebagian besar anggota yang menginginkan ketua kelompok mundur dari jabatannya. Selain karena landasan keprofesionalan seseorang, anggota kelembagaan juga mempertimbangkan dari segi pengalaman yang dimiliki seorang calon pemimpin. Kemampuan kepemimpinan ketua kelompok tani berdampak terhadap perkembangan kelompok tani di masa yang akan datang. Semakin tinggi tingkat keprofesionalan ketua kelompok tani, maka perkembangan kelompok tani di masa yang akan datang akan semakin baik.

Terlihat sangat berbeda dalam Sunaedi (2013) bahwa pemimpin yang dipilih dalam KTH Ciulu adalah orang yang dipandang sebagai tokoh masyarakat dan pemilihannya harus disaksikan oleh pemerintah desa setempat, Perum Perhutani, dan masyarakat desa. Pergantian pemimpin juga dilakukan jika seseorang tersebut tidak mampu lagi untuk menjalankan tugas dan kewajibannya.

Aspek Kultural Kelembagaan

Mengenai hakekat hidup yang dianut anggota kelompok, seluruh responden menyatakan bahwa hidup merupakan sesuatu yang baik. Hakekat hidup yang baik adalah memandang segala sesuatu dari segi positif. Kondisi sosial kelompok tani jarang terjadi konflik antar individunya, oleh sebab itu sebagian besar dari mereka memiliki hakekat hidup yang baik. Hakekat hidup yang baik ditunjukkan dengan semangat dan kerja keras anggota dalam menjadikan usaha hutan rakyat mereka ke tahap yang lebih maju. Sementara dari segi penerapan nilai dalam bekerja, seluruh responden menyatakan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dalam hal ini tidak seluruh responden menyatakan bahwa usaha hutan rakyat ini menjadi satu-satunya sumber mata pencahariannya, dengan kata lain usaha hutan rakyat sebagai sampingan disamping pekerjaan utamanya yaitu sebagai pegawai negeri sipil.

Seluruh responden menyatakan berorientasi ke masa depan, dalam hal persepsi terhadap waktu. Hal ini menandakan bahwa kondisi masyarakat sudah modern. Sebagaimana diketahui bahwa masyarakat tradisional memiliki persepsi waktu yang berorientasi ke masa lalu dan masa sekarang. Sedangkan masyarakat modern dicirikan dengan orientasinya yang jauh ke masa depan. Kelompok tani yang memiliki orientasi ke masa depan dicirikan dengan adanya upaya untuk mengembangkan usaha hutan rakyat. Persepsi umum yang dipegang oleh petani hutan adalah tanaman sebagai investasi berharga layaknya perhiasan emas yang suatu saat dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sama halnya ketika mereka menanam pohon, mereka berharap suatu saat ketika pohon tersebut sudah besar dan bisa dijual, maka mereka akan menjualnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga di masa yang akan datang seperti menyekolahkan anaknya hingga sarjana, atau menikahkan anak-anaknya.

Dalam landasan norma, unsur pertama yakni norma yang mengatur kelembagaan berasal dari agama, kearifan lokal, atau keyakinan lain yang

lebih kuat. Ketiga kelompok tani ini berlandaskan norma yang berasal dari agama. Norma yang berasal dari agama dianggap memiliki nilai yang baik oleh masyarakat. Unsur kedua untuk menganalisis terbentuknya norma di kelembagaan, seluruh responden kelompok tani menyatakan bahwa mereka lebih menghargai seseorang karena prestasi dan kemampuannya. Hal ini ditunjukkan dari penghargaan mereka terhadap para pemimpin mereka. Unsur ketiga dalam analisis norma kelembagaan, yaitu pemberian penghargaan dan sanksi kepada anggota yang berjasa atau melanggar aturan merupakan salah satu ciri terciptanya pelaksanaan norma yang ideal. Ketiga kelompok tani menyatakan pemberian sanksi berjalan dan bersifat tegas. Pemberian penghargaan dan sanksi dapat meningkatkan kinerja anggota. Kinerja kelembagaan akan menurun apabila tidak terdapat aturan yang jelas dan sanksi yang tegas. Pada umumnya kelembagaan kelompok tani lebih bersifat non-formal, dimana unsur kekeluargaan yang masih kuat.

Kultur kelembagaan erat kaitannya dengan kebiasaan anggota dalam meningkatkan produktivitas ataupun menaati aturan-aturan kelembagaan. Kedisiplinan kelembagaan yang dijalankan dicirikan dari banyak tidaknya yang patuh karena aturan tersebut dibuat berdasarkan kesepakatan bersama para anggotanya. Kedisiplinan tinggi yang ditunjukkan oleh anggota dapat membentuk sistem kerja yang berkualitas.

Ketiga kelompok tani menyatakan hampir seluruh anggotanya mengetahui aturan dalam kelompok. Maka peluang anggota melakukan pelanggaran akan semakin kecil. Karena mereka telah mengetahui sanksi dan konsekuensinya. Kelompok tani menyatakan ada disiplin dan dijalankan. Kedisiplinan anggota kelompok tani dapat dilihat dari kinerja para petani dalam mengerjakan usaha hutannya, maupun saat berpartisipasi dalam agenda kelembagaan.

Kapasitas Kelembagaan

Kelembagaan kelompok tani Kecamatan Barusjahe memiliki beberapa peran diantaranya penyelenggaraan penyuluhan dan

membantu petani yang mengalami kesulitan untuk bersama-sama mencari jalan keluar yang terbaik. Selain itu, kelembagaan kelompok tani berperan dalam penyelesaian konflik yang terjadi di dalam kelompoknya. Konflik luar kelembagaan belum pernah terjadi. Kelembagaan kelompok tani memberikan hak sepenuhnya kepada anggota untuk memasarkan tanamannya yang siap panen. Sejauh ini kelembagaan kelompok tani hanya berperan menyelenggarakan penyuluhan dan penyediaan bantuan benih/bibit serta pupuk yang bekerjasama dengan Dinas Kehutanan Kabupaten Karo. Bantuan yang disampaikan langsung melalui KTH berupa bibit maupun pupuk.

Sedikit berbeda dalam Rubiyanto (2011) dimana kelembagaan kelompok tani memiliki kapasitas dalam hal pengelolaan kredit. Kredit yang diberikan kepada anggota sebagian besar berasal dari pemerintah dan kas kelompok (10% dari penjualan saat panen).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Aktivitas pengelolaan lahan yang dilakukan oleh KTH Tani Jaya, Juma Kendit, dan Reh-Ulina, yaitu pembersihan lahan dan persemaian, penyiangan dan pendangiran, penyulaman, penjarangan, dan pemupukan.
2. Aspek struktural dalam hal pola sebaran kekuasaan bersifat distributif dimana pembagian tugas dan wewenang tidak hanya dilimpahkan ke satu orang saja tetapi didistribusikan ke beberapa orang dan mampu dan berkapasitas dalam menangani tugas tersebut.
3. Kelompok tani hutan memiliki tujuan mengutamakan kelompok dan memiliki tujuan sama, yaitu mengurangi kerusakan hutan dan meningkatkan kesejahteraan anggota.
4. Aspek kultural yang dianut anggota kelompok adalah hidup merupakan sesuatu yang baik dan memandang sesuatu dari segi positif terlihat dari

semangat dan kerja keras anggota dalam memajukan usaha hutan rakyat dan berorientasi ke masa depan.

5. Anggota KTH harus memiliki kesetiaan dan pengabdian terhadap kelompok juga harus menunjukkan partisipasi dalam kegiatan kelompok ataupun pengambilan keputusan dalam kelompok.
6. Kepemimpinan dalam kelompok dipilih dan ditetapkan berdasarkan kemampuan atau keprofesionalan yang dimiliki dengan pengalaman dan kemampuan yang lebih dibanding anggotanya.
7. Peran dan kapasitas kelembagaan dalam kelompok tani yaitu penyelenggaraan penyuluhan dan membantu mencari jalan keluar dalam kesulitan dan konflik para petani, serta memberi kebebasan dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan.

Saran

1. Perlu ditingkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah dalam hal pemberian penyuluhan yang berkaitan dengan aktivitas pengelolaan lahan.
2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui bentuk aturan dan kesepakatan yang sesuai dengan kondisi pengembangan masyarakat di lokasi penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Nurrochmat, D. R. 2005. Strategi Pengelolaan Hutan Upaya Menyelamatkan Rimba yang Tersisa. Pustaka Belajar. Yogyakarta.
- Rubiyanto, M. A. 2011. Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Rakyat Di Desa Buniwangi Kecamatan Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Skripsi. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Simon, H. 2008. Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (*Cooperative Forest Management*). Pustaka Belajar. Yogyakarta.

- Sunaedi, N. 2013. Peranan Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Petani pada Kelompok Tani Hutan (KTH) di Desa Ciulu Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis. Skripsi. Tasikmalaya: FKIP Universitas Siliwangi Tasikmalaya.
- Widiyanti, S. 2009. Studi Kelembagaan Kelompok Tani Hutan Rakyat di Wilayah Cianjur Selatan (Kasus di Kecamatan Cibinong dan Tanggeung). Sskripsi. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Yudianto, M. 2006. Go internasional dengan pengelolaan hutan lestari. *Prosiding. Dialog Stakeholders*. 24 Februari 2006. Surabaya. Pp 58